KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

96U3A80D

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI			H.1					H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 92 315 070 0 741 000									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : ERIKA DWI YUNITA									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1 21-402-01			5.160.200	5.160.200	0	5	258.010		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 119									
Nama Dokum									
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal dd mm yyyyy								
B.10									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. ID	ENTITAS PE	MOTONG PAJAK							
C.1	NPWP Insta	nsi Pemerintah :	9 5	3 3 5 0	16 2 722	0 0 0			
C.2	Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3	ID Subunit Organisasi :							7	
C.4	Tanggal	:	2 6	dd 0 1 mm	2022уууу			_	
C.5									
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : D				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	y berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	